



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



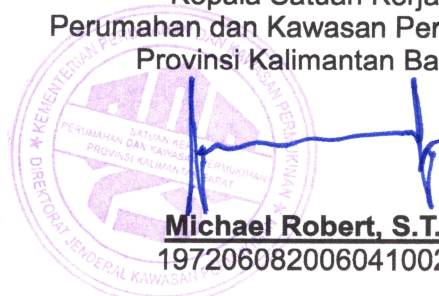
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 sebagai suatu bentuk akuntabilitas atas kinerja program dan kegiatan pada masa yang akan datang dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai Rencana Strategis (Renstra) dan acuan penganggaran dan pelaksanaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun mendatang yang di dalamnya memuat kondisi umum, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja penyediaan perumahan. Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan mengacu pada Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penyediaan perumahan yang bersifat multisektor, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara khusus di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.

Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran teknis di tingkat unit kerja atas 4 (empat) renstra Unit Organisasi yaitu, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktora Jenderal Perumahan Perkotaan dan Sekretariat Jenderal. Secara keseluruhan, penyusunan Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 telah terselesaikan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca. Semoga Renstra Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyediaan rumah yang layak huni, aman, dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pontianak, Desember 2025
Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.
197206082006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	8
A. Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat..	10
B. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	12
A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	12
B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.....	19
C. Kerangka Kelembagaan.....	20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
A. Target Kinerja.....	24
B. Kerangka Pendanaan	25
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Capaian Indikator Kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020-2024.....	3
Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	24
Tabel 4.2 Target Kinerja 2025-2029 Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	24
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan 2025-2029 Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.	2
Gambar 3.1 Struktur Organisasi di Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Matriks Kinerja Pendanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	30
Lampiran. 2 Metode Perhitungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

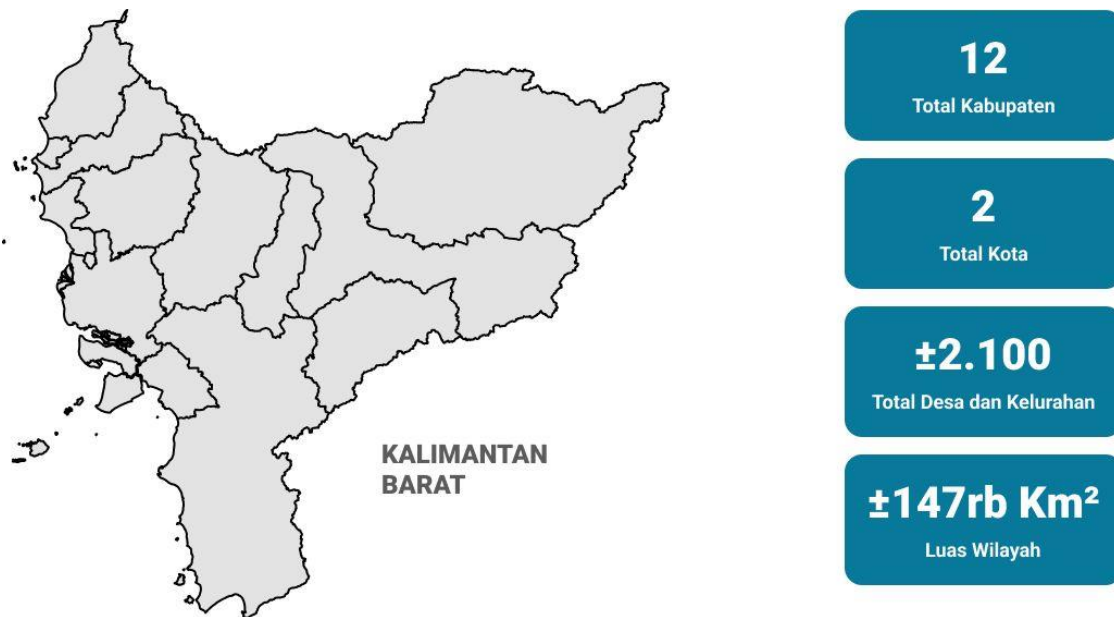
Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejalan dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Pemerintah melalui Asta Cita ke-6 berkomitmen untuk membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan.

Memasuki periode perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, tantangan penyediaan perumahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, semakin kompleks. Perubahan demografi, urbanisasi, dan dinamika kebutuhan masyarakat menuntut adanya intervensi pemerintah yang lebih responsif dan terukur. Terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas baru yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum, menegaskan fokus pemerintah untuk mempercepat penyelesaian backlog perumahan dan penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Prioritas Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.

Provinsi Kalimantan Barat secara astronomi terletak di antara garis lintang 2° 06' Lintang Utara – 3° 05' Lintang Selatan dan 108° – 114° 10' Bujur Timur pada peta bumi, sekaligus dilalui garis khatulistiwa tepatnya di Kota Pontianak. Oleh karena itu, maka Provinsi Kalimantan Barat dikategorikan dalam daerah tropic dengan suhu udara dan kelembaban tinggi. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu diantara Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur yang kini telah mempunyai 5 (lima) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan akses jalan darat untuk masuk dan keluar negara lain, yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan PLBN Sungai Kelik di Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 km² (14,68 juta Ha) dengan sebagian besar wilayah merupakan daratan berdataran rendah dan mempunyai ratusan Sungai yang aman dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang "Lembah Kapuas" serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini merupakan rawa bercampur gambut dan hutan *Mangrove*. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang luas, maka ketinggian gunung di Provinsi Kalimantan Barat relative rendah serta non-aktif.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada 13 Februari tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 5.695.475 jiwa yang tersebar

pada 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan luas wilayah sebesar 146.807 km² (14,68 juta Ha) maka kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 39,796 jiwa/km².



Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.

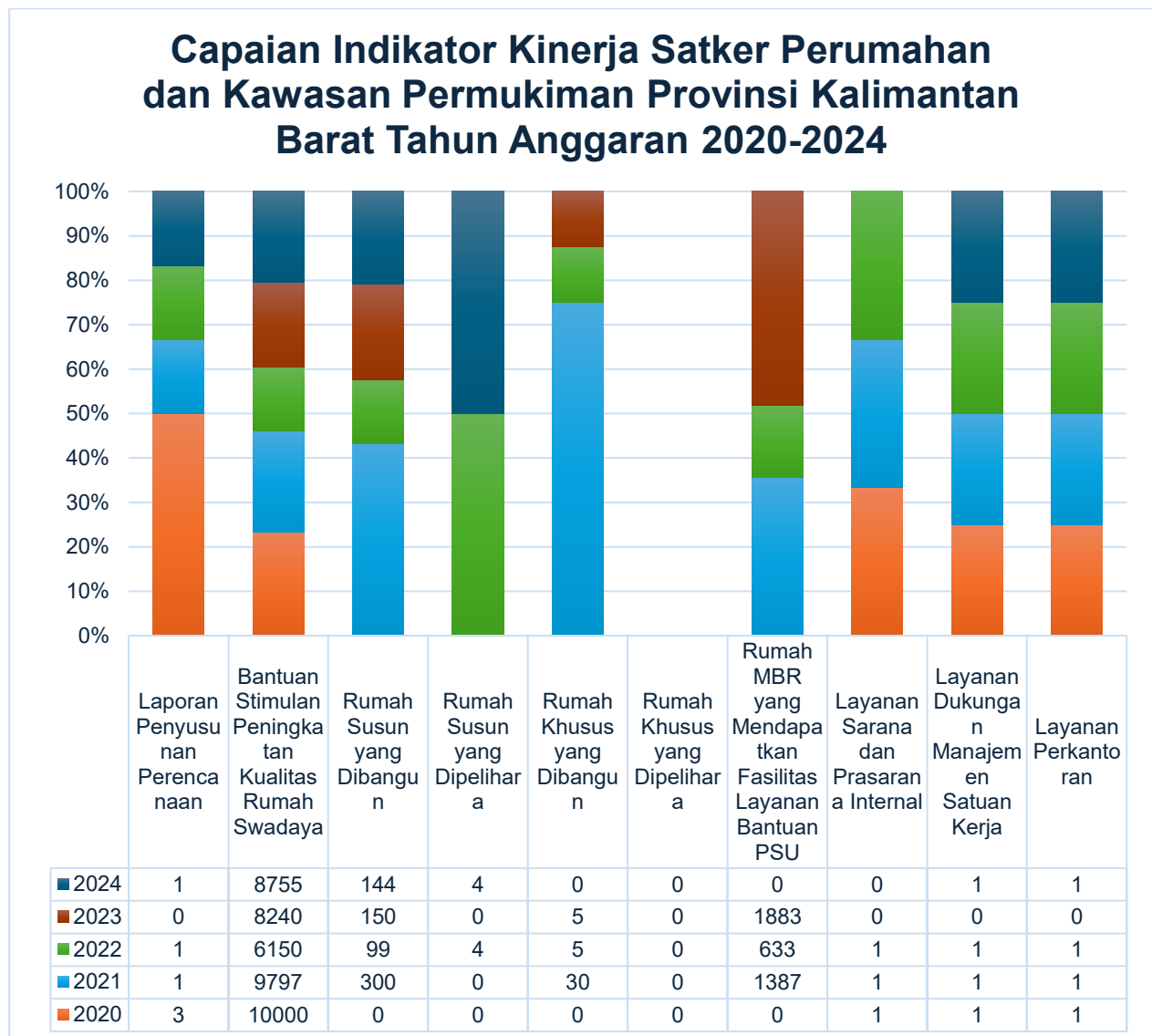
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, memegang peranan vital sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan strategi pencapaian target kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional maupun karakteristik lokal Kalimantan Barat.

Capaian kinerja pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan barat pada periode sebelumnya, tahun 2020–2024 dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Target Capaian Indikator Kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	2020-2024	RPJM 2020-2024									
		2020		2021		2022		2023		2024	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni											
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	6 Laporan	3 Laporan	50%	1 Laporan	66,67%	1 Laporan	83,33%	-	83,33%	1 Laporan	100%
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	42.942 Unit	10.000 Unit	23,29%	9.797 Unit	46,10%	6.150 Unit	60,42%	8.240 Unit	79,61%	8755 Unit	100%
Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	693 Unit	-	0%	300 Unit	43,29%	99 Unit	57,58%	150 Unit	79,22%	144 Unit	100%
Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	8 Tower	-	0%	-	0%	4 Tower	50%	-	50%	4 Tower	100%
Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	40 Unit	-	0%	30 Unit	75%	5 unit	87,50%	5 Unit	100%	-	100%
Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah MBR yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Bantuan PSU	3.883 Unit	-	0%	1.367 Unit	35,21%	633 Unit	51,51%	1.883 Unit	100%	-	100%
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan											
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Layanan	1 Layanan	33,33%	1 Layanan	66,67%	1 Layanan	100%	-	100%	-	100%
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	4 Layanan	1 Layanan	25%	1 Layanan	50%	1 Layanan	75%	-	75%	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	1 Layanan	25%	1 Layanan	50%	1 Layanan	75%	-	75%	1 Layanan	100%

Capaian kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 secara umum telah berjalan secara optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja.



Meskipun sebagian besar indikator utama seperti pembangunan Rumah Susun dan bantuan PSU telah berhasil terealisasi sepenuhnya (100%), terdapat dinamika pada program BSPS yang capaiannya telah mendekati target maksimal yaitu sebesar 99,89%. Hal ini menunjukkan komitmen Satker dalam menjaga ritme kerja meskipun terdapat tantangan teknis di lapangan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor internal berupa soliditas koordinasi antar tim serta pengawasan intensif terhadap setiap progres fisik di wilayah Kalimantan Barat.

B. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat menjadi langkah awal dalam merumuskan rencana kinerja dan strategi pelaksanaan yang tepat. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat harus bergerak secara cepat dan optimal dengan memanfaatkan potensi kewilayahan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Potensi dan permasalahan tersebut dikemukakan berikut ini.

1. Potensi, merupakan modalitas utama yang dimiliki Satuan Kerja dalam menjalankan peran strategisnya sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan perumahan di daerah. Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, potensi yang dimiliki Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan dan Program Perumahan, tersedianya kebijakan dan program pembangunan perumahan yang diarahkan pada penyediaan hunian layak, terjangkau, dan inklusif, termasuk program pengembangan perumahan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), relokasi, dan pengurangan backlog perumahan.
 - b. Pengembangan Kawasan Permukiman, adanya program penataan kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh secara bertahap, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebagai prioritas pembangunan permukiman.
 - c. Peningkatan Infrastruktur Dasar, peluang pengembangan infrastruktur dasar permukiman, meliputi air bersih, sanitasi, drainase, dan akses layanan publik, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
 - d. Pengelolaan Sanitasi dan Air Limbah, penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah regional sebagai dasar peningkatan akses sanitasi aman, serta potensi integrasi pembangunan sanitasi dengan pengembangan kawasan permukiman.
 - e. Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan, potensi penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi RTRW dengan implementasi teknis di lapangan, serta penerapan prinsip pembangunan permukiman berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - f. Peningkatan Kualitas Layanan Publik, peluang integrasi pengembangan kawasan permukiman dengan pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

2. Permasalahan, merupakan isu strategis yang harus diselesaikan oleh Satuan Kerja (Satker) Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta mengurangi ketimpangan kualitas lingkungan permukiman di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan evaluasi kinerja dan kondisi aktual, berikut adalah identifikasi permasalahan utama yang dihadapi:
 - a. Kualitas Hunian dan Perumahan, kualitas perumahan dan hunian belum memenuhi standar teknis, kesehatan, dan keselamatan, terutama dari aspek ketahanan bangunan, luas hunian, akses air minum, sanitasi, dan keamanan bermukim.
 - b. Kawasan Kumuh dan Kepadatan Permukiman, keberadaan kawasan kumuh masih signifikan dan belum mencapai target pengurangan sesuai kebijakan nasional. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, sehingga mendorong berkembangnya permukiman tidak teratur, berkepadatan tinggi, dan minim infrastruktur dasar.
 - c. *Backlog* Perumahan, tingginya *backlog* perumahan yaitu sebesar 552.937 unit akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah, kenaikan harga lahan dan hunian, serta keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - d. Sanitasi dan Air Limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik belum optimal; sebagian besar limbah rumah tangga dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengolahan. Rendahnya ketersediaan fasilitas sanitasi layak (MCK/jamban sehat) dan rendahnya capaian akses air limbah domestik aman masih menjadi persoalan utama.
 - e. Tata Ruang dan Lingkungan, tumpang tindih pemanfaatan ruang, lemahnya pengawasan tata ruang, serta dampak perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang memperburuk kualitas lingkungan permukiman.
 - f. Sosial Ekonomi Masyarakat, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan keterbatasan akses pembiayaan perumahan mendorong terjadinya hunian tidak layak, hunian padat, dan fenomena multi-keluarga dalam satu rumah.
3. Kelemahan, beberapa kelemahan internal yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat antara lain:
 - a. Kapasitas teknis dan kelembagaan di sebagian pemerintah kabupaten/kota, khususnya pada wilayah perbatasan dan wilayah pedalaman, masih belum merata, baik dari sisi perencanaan teknis, pengendalian pelaksanaan, maupun pengelolaan program berbasis kawasan.

- b. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, terutama pada kabupaten dengan karakteristik wilayah luas, sebaran permukiman terpencar, dan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar yang tinggi.
 - c. Tingginya ketergantungan terhadap teknologi konstruksi konvensional, sementara kondisi tanah gambut dan tanah lunak di wilayah pesisir dan perkotaan (seperti Pontianak, Kubu Raya, dan sekitarnya) memerlukan teknologi konstruksi khusus yang relatif lebih mahal.
 - d. Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah (antar kabupaten/kota) dalam pengembangan kawasan strategis, koridor pertumbuhan, dan kawasan perbatasan masih memerlukan penguatan agar perencanaan kawasan lebih terintegrasi.
4. Tantangan, merupakan dinamika eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat antara lain:
 - a. Kondisi geoteknik yang didominasi lahan gambut dan tanah lunak pada wilayah pesisir dan perkotaan, yang menimbulkan risiko penurunan tanah (land subsidence) serta meningkatkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman.
 - b. Kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir akibat curah hujan tinggi, luapan sungai, dan pasang air laut, yang sering terjadi pada kawasan permukiman padat di wilayah perkotaan dan bantaran sungai.
 - c. Tingginya backlog perumahan dan pertumbuhan permukiman informal di lokasi-lokasi strategis (seperti tepi sungai dan kawasan dekat pusat kegiatan ekonomi) berpotensi memperluas kawasan kumuh apabila tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak yang terjangkau.
 - d. Keterbatasan akses logistik material konstruksi dan masih bergantungnya pasokan material utama dari luar pulau menyebabkan fluktuasi harga dan berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan perumahan, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
 - e. Perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan, pasang laut, dan degradasi lingkungan kawasan gambut menjadi tantangan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang aman, berkelanjutan, dan tangguh bencana.
 - f. Ketimpangan perkembangan antarwilayah, antara kawasan perkotaan (Pontianak, Singkawang, Mempawah) dengan wilayah perdesaan, perbatasan, dan pedalaman, berpotensi memperlebar disparitas akses terhadap hunian layak dan infrastruktur permukiman.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian menyelaraskan visi Kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan serta sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan asta cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- b) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c) meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan asta cita tersebut dan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Kementerian menjadi pendukung utama asta cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan

Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029, serta mendukung terlaksananya asta cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Sebagaimana terlampir pada Tujuan Kementerian dikemukakan berikut:

1. Tujuan pertama yaitu **“Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Berkualitas, Berkeadilan Dan Berkelanjutan; Penanganan Permukiman Kumuh Yang Terpadu; Serta Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berintegritas Secara Kolaboratif”**, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen; dan
 - i. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
2. Tujuan kedua yaitu **“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman”**, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dalam rangka mendukung Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, maka penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja mengacu pada tugas dan fungsi Balai P3KP selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode 2025-2029 agar efektif, efisien, dan akuntabel maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada:

- a. RPJMN 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025-2029; dan
- f. Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025-2029.

B. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (SS1): **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**
 - a. Sasaran Program 1 (SP1), yaitu **“Meningkatnya Hunian Layak”**. Terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam Sasaran Program 1:
 - **Kegiatan 1:** Penyelenggaraan Sistem dan Strategi, dengan Sasaran Kegiatan. Dengan Sasaran Kegiatan (SK 1), yaitu:
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
 - **Kegiatan 2:** Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dengan Sasaran Kegiatan. Dengan Sasaran Kegiatan (SK 1), yaitu:

Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

- **Kegiatan 3:** Penyediaan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Kegiatan.

Dengan Sasaran Kegiatan (SK 1), yaitu:

Meningkatnya ketersediaan layak huni.

- b. Sasaran Program 2 (SP2), yaitu “**Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**”. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam Sasaran Program 2:

- **Kegiatan 1:** Penanganan Permukiman Kumuh, dengan Sasaran Kegiatan.

Dengan Sasaran Kegiatan (SK 1), yaitu:

Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.

2. Sasaran Strategis 2 (SS2): **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

- a. Sasaran Program 1 (SP1), yaitu “**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**”. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam Sasaran Program 1:

- **Kegiatan 1:** Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, dengan Sasaran Kegiatan:

Dengan Sasaran Kegiatan (SK 1), yaitu:

Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi, dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dilaksanakan melalui:
 - a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2) percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3) fasilitasi penyediaan lahan yang aman dan terjangkau;
 - 4) dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal;
 - b) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2) pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan masyarakat;
 - 3) dan dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang;
 - c) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) pendampingan dan penguatan pemerintah daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu; dan
 - 2) penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran;
 - d) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, yang diselenggarakan dengan menerapkan strategi:

- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - 3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - 5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dilaksanakan melalui:
- a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - 3) Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan di wilayah perdesaan;
 - 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria;
 - b) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - 2) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - 3) Pengembangan bantuan tunai yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - 4) Pengembangan skema kredit renovasi rumah dan kredit bangun rumah;
 - 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan

- 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembangunan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka untuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan;
- c) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal;
- d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan;

3. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dilaksanakan melalui:
 - a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, melalui strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/badan usaha milik negara serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dan pendekatan kawasan terpadu;
 - c) Mendorong pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik melalui strategi pengembangan kawasan berorientasi transit dan kawasan perkotaan baru;
 - d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan;
 - e) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan;

- f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank;
 - g) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah; dan
 - h) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rumah susun, pelatihan pengelolaan rumah susun oleh penghuni, dan integrasi rumah susun dengan fasilitas sosial dan ekonomi;
4. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dilaksanakan melalui:
- a) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat melalui strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional;
 - b) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
 - c) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan di luar kredit kepemilikan rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan seratus persen kredit kepemilikan rumah, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, serta penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, melalui strategi:
 - 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema tabungan perumahan rakyat sebagai tambahan pembiayaan penggunaan skema pinjaman atau hibah multilateral dan program perumahan hijau dan terjangkau indonesia;
 - 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan bank indonesia dan pemangku kepentingan lain;

- 3) Optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan sistem antrean perumahan; dan
- 4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan;
- d) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui strategi penyusunan kebijakan atau pengaturan mengenai mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e) Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain melalui strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan yang memerlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - 2) Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko elektronik;
 - 3) Pencanangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan tata kelola dan pengendalian risiko, sistem manajemen anti penyuapan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 4) Kerja sama investasi asing, antrean penyediaan perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, program perumahan hijau dan terjangkau Indonesia, skema jaminan penyerapan; dan
 - 5) Pembangunan baru atau renovasi melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penyiapan lahan;
5. Arah kebijakan dan strategi sekretariat jenderal, yang berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal melalui arah kebijakan ke depan difokuskan pada:
 - a) Penguatan perencanaan dan penganggaran, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci berbasis data dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan;
 - b) Transformasi digital dan tata kelola, melalui strategi:

- 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi kepegawaian pelayanan publik pengelolaan data dan informasi serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
- 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi;
- c) Penguatan sumber daya manusia, melalui strategi:
 - 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berbasis analisis beban kerja dan kompetensi;
 - 2) Pengembangan manajemen talenta aparatur sipil negara melalui pelatihan promosi berbasis merit pemetaan karier serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh bidang fungsional termasuk keuangan, pengadaan, pembinaan peraturan perundang undangan dan advokasi hukum, komunikasi dan data;
- d) Penguatan sistem informasi dan data, melalui strategi:
 - 1) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data indonesia; dan
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan perencanaan dan evaluasi program berbasis bukti;
- e) Peningkatan layanan dukungan manajemen, melalui strategi:
 - 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan pengelolaan kearsipan protokoler serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2) Penguatan layanan keamanan ketertiban dan kehumasan secara profesional dan responsif;
- f) Percepatan regulasi dan advokasi hukum, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan sumber daya manusia di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2) Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- g) Modernisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara, melalui strategi:
 - 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan
 - 2) Pengamanan dan peningkatan akuntabilitas optimalisasi pemanfaatan aset negara;
- h) Penguatan sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, melalui strategi:
 - 1) Penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa dan sumber daya manusia di bidang pengadaan; dan

- 2) Integrasi perencanaan penganggaran serta pengadaan pemanfaatan dengan sistem e-procurement untuk efisiensi dan transparansi;
- i) Penguatan komunikasi publik dan pelayanan publik, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria komunikasi publik penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - 2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi;
- j) Kolaborasi dan pendanaan alternatif, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan serta sumber pendanaan nonanggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - 2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti kredit program perumahan secara terarah dan akuntabel;

B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai penjabaran operasional dari arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, dengan fokus utama pada percepatan penyediaan hunian layak yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan. Strategi ini dirumuskan untuk menjawab tantangan spesifik kewilayahan, khususnya dalam menangani angka backlog kelayakan penghunian di Kalimantan Barat yang mencapai 410,538 ribu Kepala Keluarga.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Meneruskan dari rumusan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR;
- b. Melaksanakan kegiatan fisik pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
- c. Mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Menerapkan dan mengawasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kementerian PKP di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

- e. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia;

C. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan prinsip hierarki fungsional yang ramping struktur namun kaya fungsi. Pengorganisasian ini bertujuan untuk menjamin terciptanya tata kelola administrasi dan teknis yang akuntabel dalam pelaksanaan program perumahan.

Bagan struktur penugasan menekankan pada alur koordinasi antara pimpinan satuan kerja, pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai unsur pelaksana, serta pejabat perbendaharaan sebagai unsur pendukung keuangan. Hal ini memastikan setiap tugas pokok dan fungsi terdistribusi secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing lini. Kerangka ini terbagi menjadi tiga pilar utama:

- Pimpinan & Pengendali: Terdiri dari Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Pendukung Keuangan: Terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- Pelaksana Tekni: Terdiri dari berbagai jabatan fungsional seperti Analis, Penata, Pengelola, dan Operator yang mendukung setiap sub-bidang PPK.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi di Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai penggerak utama dalam mencapai target kinerja organisasi, keberadaan sumber daya manusia (SDM) dianalisis melalui berbagai parameter. Analisis ini bertujuan untuk memetakan kekuatan serta kapasitas Satker dalam menghadapi dinamika penugasan di lapangan. Berdasarkan data dan keterangan pada gambar, berikut adalah rincian komposisinya:

1. Komposisi Berdasarkan Status Kepegawaian

Dinamika status kepegawaian dalam organisasi mencerminkan strategi regenerasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli. Distribusi status pegawai pada unit kerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	23%
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	11	42%
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	8	31%
4.	PNS - Karya Siswa	1	4%
Total		26	100%

Sumber: Data Olahan Struktur Organisasi Satker PKP Prov. Kalbar, 2026.

2. Komposisi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualitas output pekerjaan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan para personilnya. Untuk menjamin profesionalisme dalam tugas teknis pembangunan, komposisi pendidikan pegawai dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan (Gelar)	Jumlah Pegawai	Rumpun Keahlian
1.	S.T. / M.T. / S.Tr.T.	9	Teknik Sipil / Infrastruktur
2.	S.Ars.	4	Arsitektur
3.	S.E.	5	Ekonomi / Manajemen / Keuangan
4.	S.S.T. / S.Si.	3	Sains & Teknologi Terapan
5.	S.Kom.	1	Teknologi Informasi
6.	A.Md. / Diploma	1	Tenaga Teknis Pendukung
7.	Lainnya / Tanpa Gelar Dicantumkan	3	Operasional
Total		26	

Sumber: Data Olahan Struktur Organisasi Satker PKP Prov. Kalbar, 2026.

3. Komposisi Berdasarkan Kesetaraan Gender

Organisasi menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan kesempatan yang sama dalam penugasan. Keragaman gender dalam struktur organisasi dipetakan untuk memberikan gambaran mengenai keseimbangan partisipasi pegawai:

Tabel 3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Pimpinan Satuan Kerja (Kasatker)	1
2.	Pejabat Perbendaharaan (PPK/Bendahara/PPSPM)	5
3.	Penata Kelola Perumahan (Ahli/Terampil)	8
4.	Analisis (SDM/Keuangan)	3
5.	Teknik Tata Bangunan dan Kawasan	2
6.	Pengelola Layanan Operasional / Operator	6
7.	Jabatan Fungsional Lainnya	1
Total		26

Sumber: Data Olahan Struktur Organisasi Satker PKP Prov. Kalbar, 2026.

4. Komposisi Berdasarkan Jabatan Fungsional

Pembagian beban kerja didasarkan pada formasi jabatan fungsional yang tersedia. Hal ini bertujuan agar setiap pegawai bekerja sesuai dengan keahlian spesifiknya:

Tabel 3.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan Penugasan

No.	Kualifikasi Pendidikan (Gelar)	Jumlah Pegawai	Rumpun Keahlian
1.	S.T. / M.T. / S.Tr.T.	9	Teknik Sipil / Infrastruktur
2.	S.Ars.	4	Arsitektur
3.	S.E.	5	Ekonomi / Manajemen / Keuangan
4.	S.S.T. / S.Si.	3	Sains & Teknologi Terapan
5.	S.Kom.	1	Teknologi Informasi
6.	A.Md. / Diploma	1	Tenaga Teknis Pendukung
7.	Lainnya / Tanpa Gelar Dicantumkan	3	Operasional
Total		26	

Sumber: *Data Olahan Struktur Organisasi Satker PKP Prov. Kalbar, 2026.*

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target Kinerja 2025-2029 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi 4 (empat) berdasarkan jumlah DIPA, yaitu meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan. Dalam pembahasan ini, Target kinerja dikelompokkan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan satuan output sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatannya. Adapun beberapa Kegiatan yang menjadi bagian dari intervensi Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat

A. Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi;;
2.	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum;
3.	Penyediaan Rumah Layak Huni;
4.	Penanganan Permukiman Kumuh.
B. Program: Dukungan Manajemen	
1.	Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Secara garis besar total target kinerja dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 26.549 (dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit/Hektar. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen yaitu ditetapkan target kinerja sebesar 31 Layanan. Rincian mengenai gambaran target untuk masing-masing kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Kinerja 2025-2029 Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT		2025 - 2029	
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TARGET	SATUAN
		26,594	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit
Sasaran Program:	Meningkatnya Hunian Layak	26,579	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi	10	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	10	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN			2025 - 2029	
			TARGET	SATUAN
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja		1	Laporan
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan		5	Laporan
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan		4	Laporan
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		2,076	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		2,076	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum		2,076	Unit
K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni		24,493	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		24,493	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya		20,123	Unit
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun		4,192	Unit
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun		176	Unit
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		1	Laporan
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan		1	Laporan
Sasaran Program:	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh		15	Hektar
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh		15	Hektar
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		15	Hektar
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		15	Hektar
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN		31	Layanan
Sasaran Program:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		31	Layanan
K 1	Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		31	Layanan
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		31	Layanan
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)		5	Layanan
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)		5	Layanan
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)		4	Layanan
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)		4	Layanan
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)		4	Layanan
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)		5	Layanan
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)		4	Layanan

B. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan target kinerja kegiatan 2025-2029 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang sudah ditetapkan sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka telah ditetapkan juga alokasi kebutuhan pendanaan 2025-2029 untuk mendukung pencapaian target-target tersebut. Secara garis besar total kebutuhan pendanaan dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 2.865.264.282.000,- (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan untuk Program Dukungan Manajemen Sebesar 61.054.109.000,- (enam puluh satu miliar lima puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).

Rincian kerangka pendanaan untuk masing-masing output kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan 2025-2029 Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029		
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TARGET	SATUAN	PENDANAAN (Rp Ribu)
		26,594	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit	2,865,264,282
Sasaran Program:	Meningkatnya Hunian Layak	26,579	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	2,835,264,282
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi	10	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	1,450,872
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	10	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	1,450,872
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	38,472
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	5	Laporan	1,108,893
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4	Laporan	303,508
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	2,076	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	32,549,255
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	2,076	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	32,549,255
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	2,076	Unit	32,549,255
K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni	24,493	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	2,801,264,155
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	24,493	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	2,801,264,155
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	20,123	Unit	542,371,150
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	4,192	Unit	1,913,400,054
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	176	Unit	344,771,892
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	2,847
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	1	Laporan	718,212
Sasaran Program:	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	15	Hektar	30,000,000
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh	15	Hektar	30,000,000
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	15	Hektar	30,000,000
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	15	Hektar	30,000,000
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN	31	Layanan	61,054,109
Sasaran Program:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	31	Layanan	61,054,109
K 1	Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	31	Layanan	61,054,109



SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	31	Layanan	61,054,109
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	5	Layanan	58,911,052
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	5	Layanan	113,550
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	4	Layanan	299,172
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	4	Layanan	487,780
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan	303,508
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	5	Layanan	505,467
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan	433,582



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2029 disusun untuk mendukung Rencana Strategis 4 (empat) Unit Organisasi yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai arahan operasional bagi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing unit organisasi.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2025-2029 akan dilaksanakan beberapa program yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Adapun Alokasi Target untuk Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 26.549 (dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit/ Hektar dengan total alokasi kebutuhan pendanaan sebesar 2.865.264.282.000,- (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen ditetapkan target kinerja sebesar 31 (tiga puluh satu) Layanan, dengan alokasi kebutuhan sebesar 61.054.109.000,- (enam puluh satu miliar lima puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah).

Proses pencapaian sasaran, target program dan kegiatan dalam Renstra memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan, agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal serta mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal. Akhir kata, Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 perlu dijabarkan dalam rencana aksi di masing-masing oleh Balai dan juga Satuan Kerja yang berada di wilayah kewenangan balai secara konsisten.

Evaluasi Renstra dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran capaian indikator kinerja utama, indikator program, dan indikator kegiatan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja. Proses evaluasi mencakup pengumpulan dan verifikasi data, analisis capaian dan kesenjangan kinerja, serta penilaian konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Adapun pengukuran dan hasil evaluasi Renstra digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, penyesuaian strategi dan kebijakan, serta penyusunan perencanaan periode berikutnya, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi yang juga dilaporkan ke dalam Laporan Akuntabilitas

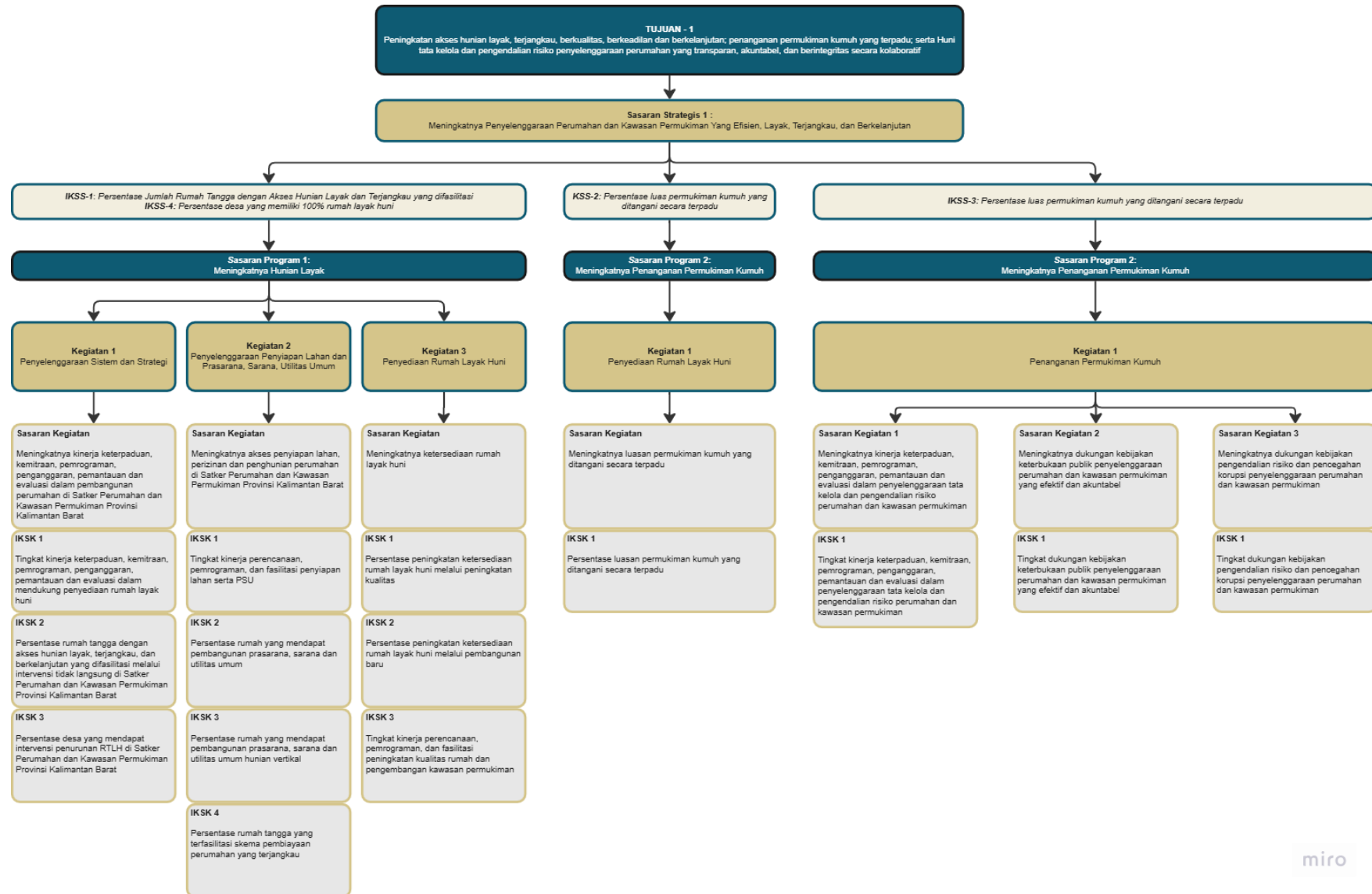
Kinerja (LAKIN), baik triwulan maupun tahunan. Dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja, pelaksanaan Renstra Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

Lampiran. 1 Matriks Kinerja Pendanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029

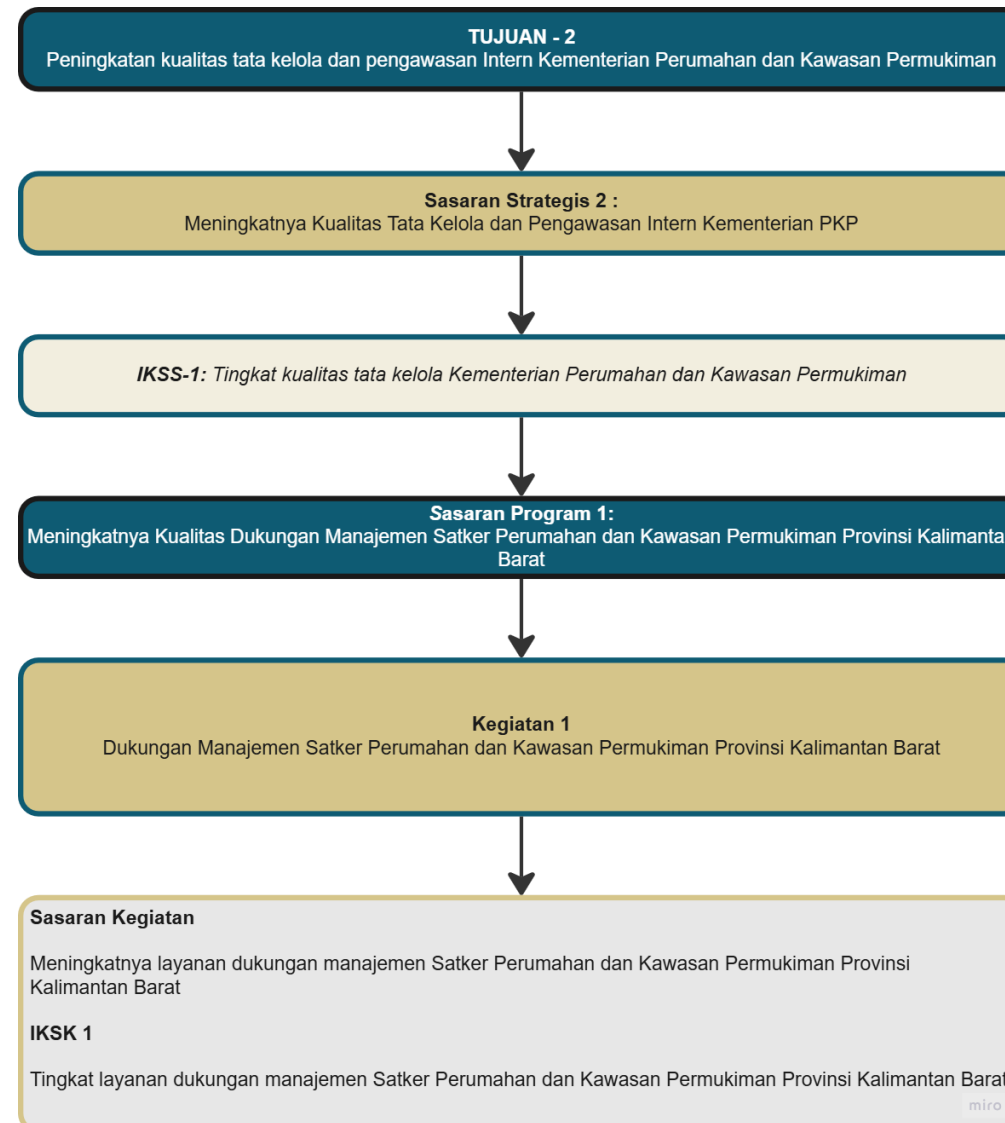
+	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TOTAL	ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit, Hektar	26,594	110,937,265	649,898,627	669,802,297	701,435,413	733,190,680	2,865,264,282
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:									
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	10	146,206	300,904	317,153	334,279	352,330	1,450,872
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	10	146,206	300,904	317,153	334,279	352,330	1,450,872
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	1	38,472	-	-	-	-	38,472
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	5	107,734	230,904	243,373	256,515	270,367	1,108,893
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	4	-	70,000	73,780	77,764	81,963	303,508
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	2,076	-	7,606,949	7,910,015	8,273,693	8,758,599	32,549,255
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	2,076	-	7,606,949	7,910,015	8,273,693	8,758,599	32,549,255
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	2,076	-	7,606,949	7,910,015	8,273,693	8,758,599	32,549,255
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni		Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	24,493	80,791,059	641,990,774	661,575,130	692,827,441	724,079,751	2,801,264,155
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	24,493	80,791,059	641,990,774	661,575,130	692,827,441	724,079,751	2,801,264,155

+ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET TOTAL	2025	2026	ANGGARAN (Rp Ribu)		
-1	-2	-3	-9	-10	-11	-12	2027	2028	TOTAL
							2029	-14	-15
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	20,123	80,070,000	107,529,715	112,893,430	118,257,145	123,620,860	542,371,150
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	4,192	-	451,629,967	465,156,500	487,256,696	509,356,891	1,913,400,054
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	176	-	82,831,092	83,525,200	87,313,600	91,102,000	344,771,892
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	1	2,847	-	-	-	-	2,847
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	718,212	-	-	-	-	718,212
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
SASARAN PROGRAM:									
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh									
KEGIATAN:		Hektar	15.00	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
Penanganan Permukiman Kumuh									
SASARAN KEGIATAN:		Hektar	15.00	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15.00	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN		Layanan	31	4,620,988	13,091,056	13,747,015	14,435,848	15,159,202	61,054,109
SASARAN STRATEGIS 2:									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM:									
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat									
KEGIATAN:		Layanan	31	4,620,988	13,091,056	13,747,015	14,435,848	15,159,202	61,054,109
Dukungan Manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat									
SASARAN KEGIATAN:		Layanan	31	4,620,988	13,091,056	13,747,015	14,435,848	15,159,202	61,054,109
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	4,602,628	12,600,197	13,230,207	13,891,717	14,586,303	58,911,052
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	7,521	24,600	25,830	27,122	28,478	113,550
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	4	-	69,000	72,726	76,653	80,792	299,172
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	4	-	112,500	118,575	124,978	131,727	487,780
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	4	-	70,000	73,780	77,764	81,963	303,508
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	10,839	114,760	120,498	126,522	132,849	505,467
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	4	-	100,000	105,400	111,092	117,091	433,582

Lampiran. 2 Metode Perhitungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029



miro



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1:					
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2028: 0 laporan 2026: 0 laporan 2029: 0 laporan 2027: 0 laporan Total: 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2028: 1 laporan 2026: 1 laporan 2029: 1 laporan 2027: 1 laporan Total: 5 laporan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		OK 3 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2028: 1 laporan 2026: 1 laporan 2029: 1 laporan 2027: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum 2:					
SK 1 Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	IKSK 1 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Unit 2028: 519 Unit 2026: 519 Unit 2029: 519 Unit 2027: 519 Unit Total: 2.076 Unit	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni 3:					
SK 1 Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat.	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2.355 Unit 2028: 4.442 Unit 2026: 4.442 Unit 2029: 4.442 Unit 2027: 4.442 Unit Total: 20.123 Unit		
	IKSK 2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Unit 2028: 1.048 Unit 2026: 1.048 Unit 2029: 1.048 Unit 2027: 1.048 Unit Total: 4.192 Unit	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Unit 2028: 44 Unit 2026: 44 Unit 2029: 44 Unit 2027: 44 Unit Total: 176 Unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Laporan 2028: 0 Laporan 2026: 0 Laporan 2029: 0 Laporan 2027: 0 Laporan Total: 1 Laporan		
		OK 5 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Laporan 2028: 0 Laporan 2026: 0 Laporan 2029: 0 Laporan 2027: 0 Laporan Total: 1 Laporan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM					2:
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
Kegiatan					1:
Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 15,00 Ha 2028: 0 Ha 2026: 0 Ha 2029: 0 Ha 2027: 0 Ha Total: 15,00 Ha	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS					2:
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN PROGRAM					1:
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat					

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat					
SK 1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 5 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Layanan Umum <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 5 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Layanan 2028: 1 Layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
			2026: 1 Layanan 2027: 1 Layanan		
			2029: 1 Layanan Total: 4 Layanan		
		OK 4 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 5 Layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(Ditjen Perumahan Perkotaan)	Permukiman Kalimantan Barat Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 Layanan 2028: 1 Layanan 2026: 1 Layanan 2029: 1 Layanan 2027: 1 Layanan Total: 4 Layanan		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT